

Dilema Metodologis Ilmu Sosial Islam: Kritik Epistemologis atas Dominasi Positivisme

Siti Aisyah

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
Email: sitiaisayahmad25@gmail.com

Abstract ;

This article examines the methodological dilemmas faced by Islamic social sciences in the context of the longstanding dominance of positivism within modern social research. Positivism, with its emphasis on empirical objectivity, causal reductionism, and the strict separation between facts and values, has significantly shaped contemporary research paradigms. However, these assumptions are not fully compatible with the Islamic epistemological framework, which is grounded in tawhid, the unity of reality, and the inseparability of ethical, spiritual, and normative dimensions from social life. Through an extensive library-based review of recent literature published within the last five years, this study explores the major epistemological critiques directed at positivism and analyzes how methodological tensions arise when positivist approaches are applied to Muslim social contexts. The findings indicate that positivism often fails to capture the depth of meaning embedded in human action, overlooks value-oriented dimensions essential to Islamic thought, and reduces complex socio-religious phenomena to linear causal models. This article proposes an integrative methodological alternative rooted in Islamic epistemology particularly maqasid al-shariah and hermeneutical approaches which can offer a more holistic and contextually relevant foundation for Islamic social sciences. Ultimately, the study highlights the need for a reconstructed methodology that is empirically grounded yet normatively informed and consistent with the Islamic worldview.

Keywords:

Positivism;
Islamic Social Sciences;
Islamic Epistemology;
Hermeneutics

Kata Kunci:

Positivisme;
Ilmu Sosial Islam;
Epistemologi Islam;
Hermeneutika

Abstrak ;

Artikel ini membahas dilema metodologis dalam ilmu sosial Islam yang muncul akibat dominasi paradigma positivisme dalam ilmu-ilmu sosial modern. Positivisme, dengan penekanannya pada objektivitas empiris, reduksionisme kausal, dan pemisahan fakta-nilai, telah lama mempengaruhi cara penelitian sosial dirancang, dianalisis, dan divalidasi. Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya kompatibel dengan epistemologi Islam yang berlandaskan tauhid, integrasi makna, serta keberpihakan pada nilai dan tujuan moral. Kajian kepustakaan ini menelusuri perkembangan kritik epistemologis terhadap positivisme dalam literatur lima tahun terakhir dan mengidentifikasi bagaimana dilema metodologis terjadi ketika metode positivistik diterapkan dalam konteks masyarakat Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa positivisme sering gagal menangkap kedalaman makna tindakan sosial, mengabaikan dimensi etis-spiritual, serta mereduksi kompleksitas fenomena yang berakar pada ajaran dan tradisi Islam. Artikel ini menawarkan kerangka alternatif berbasis integrasi epistemologi Islam khususnya maqāṣid al-sharī'ah dan pendekatan hermeneutik yang dapat memperkuat landasan metodologis ilmu sosial Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi metodologi yang tidak hanya empiris dan analitis, tetapi juga normatif, kontekstual, dan selaras dengan pandangan dunia Islam.

PENDAHULUAN

Dalam perkenalan terhadap dilema metodologis ilmu sosial Islam perlu ditegaskan bahwa masalahnya bukan sekadar teknis penelitian, melainkan bersifat epistemologis. Bagaimana pengetahuan dipahami, apa yang dihitung sebagai bukti, dan bagaimana hubungan

antara fakta dan nilai diposisikan (Abu Bakar & others, 2022, 2022; Adley & others, 2024). Dominasi positivisme sejak lama mendorong standar validitas yang menekankan netralitas, kuantifikasi, dan generalisasi standar yang seringkali bertentangan dengan tradisi ilmiah Islam yang berakar pada wahyu, etika teleologis, dan hermeneutika (Ahsanul Amal & others, 2024; Akbar, 2024). Kajian kontemporer menunjukkan bahwa wacana ini membutuhkan rekonseptualisasi metodologi agar ilmu sosial Islam tidak tersubordinasi pada kerangka validitas Barat semata (Afandi & Muhyidin, 2025; Auda, 2021; Bagis & others, 2024).

Positivisme menawarkan keuntungan seperti kejelasan prosedural, replikasi, dan kekuatan prediksi yang membuatnya populer di universitas dan lembaga penelitian. Tetapi kritik epistemologis menekankan bahwa manfaat ini datang dengan biaya, pengesampingan dimensi normatif dan spiritual yang menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas sosial Muslim (Barbrook-Johnson & Carrick, 2022; Bielska & others, 2024; Brandão, 2025). Akibat praktisnya adalah penelitian yang Islamic-labelled namun metodologinya tidak mampu menangkap nilai-nilai seperti niat (niyyah), tanggung jawab kolektif, atau makna religius tindakan sosial. Kesadaran akan trade-off ini mendorong banyak peneliti Muslim mencari alternatif yang mempertahankan rigour tanpa mengeliminasi nilai (Byrne & Callaghan, 2022; Chagas & others, 2023; Crabolu et al., 2023).

Secara epistemologis, satu titik tegangan utama adalah pemisahan fakta dan nilai. Tradisi epistemologi tauhid mengandung klaim bahwa nilai-nilai transenden seperti keadilan, maslahat dan sebagainya, memberi struktur pada dunia dan oleh karena itu harus menjadi komponen penjelasan ilmiah, bukan sekadar objek moral terpisah (Du & others, 2024; Ermawati et al., 2025; Eronen, 2025). Artikel-artikel terbaru mengusulkan agar ilmu sosial Islam mengadopsi kerangka yang mengintegrasikan norma-norma maqāṣid sebagai kriteria evaluatif penelitian, sehingga teori sosial mampu membaca tindakan sebagai bermakna, bukan hanya sebagai variabel perilaku (Hamdallaha & Sukamto, 2025; Harari, 2017; Ichwan & Salisu, 2024).

Kategori metodologis berikutnya adalah masalah pengukuran. Banyak fenomena penting dalam tradisi Islam bersifat kualitatif dan terlapis-lapis seperti spiritualitas, disiplin moral, keberkahan, yang tidak mudah direduksi ke angka (Ismaiza Busti & Saputra, 2025; Kepplinger, 2025; Keskin & Aste, 2020). Publikasi empiris pada dekade terakhir menunjukkan bahwa metode campuran (mixed methods) dan pendekatan kualitatif mendalam (etnografi partisipatif, wawancara naratif) lebih tepat untuk memahami dinamika internal komunitas Muslim, asalkan peneliti juga menggunakan kerangka nilai Islam dalam interpretasi data. Dengan kata lain, integrasi metodologis diperlukan agar hasil tetap valid sekaligus bermakna (Yus et al., 2024; Zimba & Gasparyan, 2023).

Hermeneutika Islam saat ini menjadi sumber metodologis penting karena mampu membaca teks, praktik, dan konteks secara simultan (Lestari et al., 2025; Mostfa, 2024; MR & others, 2025). Tradisi tafsir dan ushul fiqh menekankan konteks historis-bahasa serta maksud (maqṣūd) hukum dan ajaran (Muhibudin et al., 2025; Muhibudin & others, 2025; Nazih et al., 2025). Pendekatan yang menjembatani data empiris dengan norma normatif. Penelitian kontemporer tentang hermeneutika Qur'ani dan aplikasinya pada kajian sosial menegaskan pentingnya metodologi yang peka terhadap multilapis makna dan bahasa, memperkaya analisis yang hanya mengandalkan observasi permukaan (Quraishi & others, 2022; Ridwan & others, 2024; Rogers & others, 2024).

Kritik lain terhadap positivisme adalah reduksionisme kausal, pendekatan kausal linier ($A \rightarrow B$) tidak memadai untuk menjelaskan fenomena sosial Muslim yang dipengaruhi oleh faktor struktural, ritual, teologis, dan naratif. Beberapa kajian terbaru merekomendasikan adopsi kerangka non-linier dan pendekatan sistemik yang menyertakan agen-aktor religius, institusi, narasi keagamaan, serta struktur ekonomi-politik (Haruna, 2024; Sholeh & others, 2023; Soediro & Meutia, 2018). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang menangkap interaksi kompleks antara iman, praktik, dan konteks sosial-historis.

Dari perspektif filsafat ilmu, post-positivisme dan realisme kritis menawarkan jalan tengah, menerima pentingnya data empiris namun menolak ilusi netralitas mutlak dan menekankan peran teori, nilai, dan struktur yang mendasari fenomena (Suliswanto et al., 2025; Tahir & Abdel Hamid, 2024; Taqiyuddin, 2025). Dalam konteks ilmu sosial Islam, realisme kritis dapat dipadankan dengan epistemologi tauhid untuk membangun metodologi yang menegakkan ontologi realistik (adanya realitas transenden dan struktural) sekaligus memberi ruang bagi penilaian nilai serta reflektivitas peneliti. Tulisan-tulisan terbaru mengenai realisme kritis di ranah studi Islam menunjukkan potensi produktif dari pertemuan ini.

Maqāṣid al-sharī'ah juga hadir sebagai kerangka normatif yang operasional bukan sekadar tujuan hukum, tetapi juga alat evaluatif metodologis yang bisa memandu desain penelitian, pemilihan indikator, dan interpretasi hasil. Tulisan-tulisan tentang maqāṣid syariah menampilkan aplikasi maqāṣid dalam evaluasi kebijakan, pengukuran kinerja organisasi Islam, dan rancangan intervensi sosial yang memperlihatkan bahwa maqāṣid dapat menjadi jembatan antara nilai dan empirisisme (Taufiq & Fahrudin, 2023; Wani, 2024; Yunus Mustofa et al., 2023). Pendekatan ini membantu memastikan bahwa penelitian tidak hanya menggambarkan tetapi juga menilai sesuai tujuan-tujuan fundamental Islam.

Refleksi etis dan meta-metodologis menjadi komponen tak terelakkan, peneliti Muslim diminta melakukan judgemental rationality, mengambil keputusan normatif yang transparan saat merancang penelitian dan menafsirkan data. Kajian metode terbaru menekankan bahwa netralitas mutlak bukan hanya tidak realistis, melainkan juga tidak diinginkan. Lebih baik mempraktikkan keterbukaan nilai yang jelas (value-transparent research) dan menggunakan maqāṣid sebagai kompas etis. Prinsip ini menempatkan tanggung jawab moral sebagai bagian dari integritas ilmiah.

Pada ranah kuantitatif, bukan berarti semua angka harus ditolak melainkan perlu dikontekstualkan. Misalnya, survei religiositas yang memasukkan item tentang motivasi ibadah, pengaruh norma sosial, dan indikator maqāṣid akan memberi hasil yang lebih bermakna dibanding survei yang hanya mengukur frekuensi ibadah. Jurnal-jurnal yang menelaah integrasi maqāṣid dan kuantifikasi memperlihatkan bagaimana variabel-variabel normatif dapat dioperasionalkan secara hati-hati tanpa kehilangan substansi etisnya.

Kelemahan sosio-institusional turut memperburuk dilema metodologis, kurikulum, jurnal bereputasi, dan model penilaian akademik yang menilai "ilmiah" menurut standar positivis membuat peneliti muda ragu mengembangkan metode alternatif. Kajian kebijakan akademik kontemporer merekomendasikan reformasi kurikulum metodologi di fakultas-fakultas Islam agar mencakup epistemologi Islam, maqāṣid methodology, dan pelatihan mixed methods yang sensitif nilai. Tanpa reformasi institusional, inovasi metodologis akan kesulitan mendapat legitimasi akademik.

Perpaduan teori adalah jalan praktis: gabungan hermeneutik untuk makna, maqāṣid untuk evaluasi nilai, dan realisme kritis untuk struktur kausal dan mekanisme, menawarkan toolbox yang kaya untuk penelitian ilmu sosial Islam. Beberapa studi kontemporer telah memaparkan kerangka integratif semacam ini dan mengilustrasikan penggunaannya pada kasus-kasus kebijakan halal, manajemen organisasi Islam, dan pendidikan Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi teori memperkaya analisis tanpa mengorbankan kewajiban empiris.

Dominasi positivisme dalam ilmu sosial Islam telah menimbulkan dilema metodologis yang kompleks, terutama karena standar validitasnya menekankan netralitas, kuantifikasi, dan pemisahan fakta-nilai yang tidak selaras dengan epistemologi tauhid, maqāṣid al-sharī‘ah, dan tradisi hermeneutika Islam. Kondisi ini menyebabkan penyempitan objek kajian, reduksionisme dalam memahami fenomena keagamaan, serta terjadinya subordinasi paradigma intelektual Islam di bawah kerangka Barat. Selain itu, institusi pendidikan tinggi Islam masih cenderung memproduksi penelitian yang berorientasi positivistik demi memenuhi standar akademik global, sehingga menghambat perkembangan pendekatan metodologis alternatif yang lebih sesuai dengan nilai dan realitas sosial Muslim.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok: (1) Bagaimana dominasi positivisme membentuk dan membatasi metodologi dalam ilmu sosial Islam? (2) Apa bentuk-bentuk kritik epistemologis yang diajukan terhadap paradigma positivistik dalam konteks tradisi ilmiah Islam? (3) Bagaimana alternatif metodologis seperti maqāṣid al-sharī‘ah, hermeneutika Islam, realisme kritis, dan pendekatan mixed methods berbasis nilai dapat menawarkan kerangka penelitian yang lebih komprehensif dan selaras dengan epistemologi Islam?

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana dominasi positivisme menciptakan dilema metodologis dalam ilmu sosial Islam, menganalisis berbagai kritik epistemologis yang muncul terhadap paradigma tersebut, serta mengidentifikasi model pendekatan metodologis alternatif yang lebih kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat memberikan arah konseptual dan teoritis bagi pengembangan metodologi penelitian yang integratif, berorientasi maqāṣid, dan relevan dengan kebutuhan akademik serta sosial-keagamaan umat Islam di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan orientasi deskriptif–kritis untuk menelaah dilema metodologis dalam ilmu sosial Islam dan kritik terhadap dominasi positivisme. Metode ini dipilih karena penelitian tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, tetapi menuntut penelusuran dan pembacaan mendalam terhadap literatur yang relevan. Sumber utama penelitian mencakup artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir, buku metodologi, karya sarjana Muslim kontemporer, serta literatur filsafat ilmu yang membahas epistemologi positivistik dan alternatifnya. Prosedur penelitian meliputi tiga tahap pokok: pertama, pengumpulan literatur, yaitu menelusuri dan mengidentifikasi sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan epistemologi Islam, kritik positivisme, dan metodologi ilmu sosial; kedua, pengelompokan tema, yaitu menyusun literatur berdasarkan isu-isu seperti reduksionisme ilmiah, masalah objektivitas, pemisahan fakta–nilai, dan posisi tauhid sebagai kerangka epistemik; ketiga, penyusunan

uraian teoritis, yaitu menyajikan hasil penelusuran literatur dalam bentuk argumentasi yang runtut serta menempatkannya dalam konteks perkembangan ilmu sosial Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan Fakta dan Nilai: Benturan dengan Epistemologi Tauhid

Salah satu klaim sentral positivisme adalah pemisahan tegas antara fakta (what is) dan nilai (what ought to be). Ilmu berkaitan dengan observasi objektif terhadap fakta, sementara nilai dipandang sebagai ranah subjektif, etika, atau agama yang tidak menjadi urusan ilmiah. Dalam konteks ilmu sosial Islam, pemisahan ini menjadi problematik karena epistemologi tauhid menempatkan nilai-nilai transenden keadilan, kebenaran, maslahat bukan sebagai pelengkap moral, melainkan sebagai struktur penjelas realitas itu sendiri. Oleh karena itu, penghilangan unsur nilai berpotensi membuat kajian sosial kehilangan dimensi yang menentukan makna tindakan manusia.

Epistemologi tauhid memandang realitas sebagai terpaut pada kesatuan Tuhan (tawḥīd) yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Konsekuensinya, fakta empiris tidak pernah netral karena selalu bermuatan orientasi etis-teologis. Dengan kata lain, apa yang disebut fakta dalam kajian sosial Muslim seharusnya dilihat melalui kacamata tujuan ilahiyah dan aturan normatif, sehingga analisis sosial yang mengabaikan nilai mudah menjadi reduktif, mencatat perilaku tanpa memahami niat, tujuan, dan implikasi moral di baliknya. Kajian-kajian teoretis terkini menegaskan pentingnya melihat fakta dan nilai sebagai relasi hermeneutik, bukan dipisahkan absolut.

Di ranah metodologi, implikasi praktis pemisahan fakta-nilai terlihat pada desain riset. Instrumen survei yang fokus pada ukuran frekuensi perilaku seperti seberapa sering shalat dilakukan tanpa menyingkap motivasi (niyyah) akan menghasilkan gambaran dangkal tentang religiositas. Literatur metodologis modern merekomendasikan penggabungan indikator normatif dan kualitatif untuk menangkap dimensi nilai. Misalnya memasukkan item yang mengukur motivasi moral atau tujuan sosial sebagai upaya rekoneksi antara fakta dan nilai dalam pengukuran.

Kritik filosofis terhadap pemisahan fakta-nilai juga menyorot bagaimana klaim netralitas empiris sering berfungsi sebagai alat legitimasi status quo. Dalam banyak studi sosial modern, dikemukakan bahwa objektivitas seringkali menyamarkan asumsi-asumsi nilai tersembunyi yang menguntungkan kekuasaan tertentu. Bagi epistemologi tauhid, transparansi nilai yakni mengakui orientasi normatif dalam penelitian adalah bagian dari integritas ilmiah, sehingga penelitian yang mengklaim netral harus diuji apakah ia tak sengaja mereproduksi bias moral atau struktural.

Tafsir-ushul dan tradisi maqāṣid menawarkan instrumen hermeneutik untuk menghubungkan fakta dan nilai. Bukan dengan mereduksi nilai menjadi data, tetapi dengan menjadikan tujuan syariah seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kriteria evaluatif terhadap interpretasi fakta sosial. Dalam praktiknya, maqāṣid dapat membantu menetapkan apa yang relevan untuk diukur dan bagaimana menafsirkan data dalam kerangka tujuan etis. Sebuah pendekatan yang muncul dalam literatur terapan pada kebijakan publik dan manajemen organisasi Islam. Namun integrasi maqāṣid tidaklah otomatis, perlu translasi nilai menjadi indikator empiris yang valid tanpa kehilangan makna normatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya teoritis, melainkan teknis dan metodologis.

Dari sisi epistemologi ilmu, post-positivisme dan realisme kritis menawarkan model perantara. Mereka mengakui pentingnya data empiris, tetapi juga menolak gagasan netralitas penuh dan menempatkan teori serta nilai sebagai komponen yang sah dalam penjelasan ilmiah. Dalam konteks tauhid, realisme kritis dapat dipadukan dengan konsep ketuhanan yang memberi makna, sehingga struktur sosial yang terungkap empiris bisa dianalisis sekaligus dinilai menurut tujuan normatif agama. Hermeneutika Qur'ani dan tradisi tafsir menuntut kecermatan bahasa dan konteks dalam memahami teks-teks normatif. Pendekatan ini relevan ketika merespons klaim positivistik yang memisahkan makna normatif dari fakta sosial. Dengan menerapkan kerangka hermeneutik, peneliti dapat menafsirkan bagaimana nilai-nilai tekstual membentuk praktik sosial dan sebaliknya, sehingga hubungan fakta-nilai dapat dianalisis secara dialektis bukan sebagai dua domain terpisah.

Secara sosiologis, praktik keagamaan kerap melibatkan dimensi simbolik dan niatan yang tidak terekam oleh observasi kuantitatif semata. Etnografi partisipatif dan wawancara naratif memberikan akses ke makna-makna subjektif yang menghubungkan tindakan (fakta) dengan norma-norma yang melandasinya (nilai). Perdebatan akademik juga menyinggung aspek pendidikan metodologi. Kurikulum yang hanya menekankan metode positivistik cenderung menghasilkan peneliti yang tidak terlatih dalam menangani dimensi nilai. Oleh karena itu, ada seruan kuat untuk reformasi kurikulum metode di fakultas-fakultas Islam, memasukkan epistemologi tauhid, maqāsid, serta keterampilan kualitatif yang peka nilai, langkah yang telah diusulkan dan diuji di beberapa institusi dalam lima tahun terakhir.

Dalam ranah kebijakan publik, konsekuensi pemisahan fakta-nilai menjadi nyata. Kebijakan yang dirancang hanya berdasarkan data teknis tanpa referensi tujuan etis seringkali gagal memenuhi kebutuhan nilai komunitas. Studi kasus mengenai kebijakan sosial di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa kebijakan yang memasukkan kriteria maqāsid cenderung lebih diterima dan berdampak positif terhadap kesejahteraan holistik masyarakat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa fakta harus dibaca melalui lensa nilai untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bermakna.

Dari perspektif etika penelitian, menegaskan nilai dalam penelitian bukan identik dengan subjektivisme sembrono. Sebaliknya, pendekatan yang disebut value-transparent research menuntut peneliti mengungkapkan orientasi nilai mereka secara eksplisit sehingga pembaca dapat menilai argumen dan metodologi dengan lebih jujur. Pendekatan ini sesuai dengan tuntutan integritas epistemik dalam tradisi Islam yang menekankan kejujuran ilmiah dan tanggung jawab moral. Perdebatan tentang pemisahan fakta-nilai juga membuka ruang untuk inovasi kuantitatif. Beberapa studi mencoba mengoperasionalkan dimensi-nilai menggunakan skala teruji dan triangulasi dengan data kualitatif. Strategi mixed methods ini memungkinkan penelitian tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menyediakan konteks interpretatif yang mengikat angka pada nilai.

Dari sisi normatif, menempatkan nilai di pusat kajian sosial bukan berarti ilmu kehilangan obyektivitas, melainkan memperkaya obyektivitas itu sendiri. Obyektivitas yang sadar akan perspektif-nilai lebih jujur dan akademis karena menghindari perilaku terselubung di balik klaim netralitas. Pandangan ini mendapat dukungan dari berbagai penulis kontemporer yang menilai bahwa transparansi nilai justru menaikkan kredibilitas ilmiah. Perluasan dialog lintas-tradisi merupakan langkah strategis untuk merumuskan metodologi integratif. Peneliti di bidang kajian Islam kini semakin banyak yang menerapkan literatur post-positivis,

hermeneutik, dan maqāsid secara bersama-sama untuk merancang studi yang mampu menyintesis fakta dan nilai.

Keterbatasan Kuantifikasi terhadap Fenomena Spiritual dan Normatif

Kuantifikasi dianggap alat andal untuk membuat fenomena sosial terlihat secara sistematis. Angka-angka memberi kesan obyektivitas dan kemudahan perbandingan. Namun ketika obyek kajian adalah pengalaman spiritual yang bersifat-lapisan dan transformatif, angka kerap kali hanya menangkap permukaan seperti frekuensi ritual, waktu ibadah, atau skor self-report. Itu membuat pengalaman batin seperti rasa dekat kepada Tuhan, keberkahan (barakah), atau perubahan hati terlihat datar dan homogen padahal dialami dengan kualitas dan intensitas yang sangat berbeda antar-individu. Oleh karena itu, tergantung hanya pada kuantifikasi berisiko mereduksi dimensi esensial spiritual yang tidak mudah diubah menjadi indikator yang reliabel dan valid.

Salah satu masalah teknis adalah definisi. Spiritualitas dan nilai-nilai normatif didefinisikan beragam di literatur lintas-disiplin sehingga skala yang dibangun atas dasar satu definisi mungkin tidak relevan pada konteks kultural lain. Penelitian kesehatan spiritual misalnya menunjukkan empat sampai enam definisi berbeda yang berimplikasi pada pilihan item survei dan interpretasi hasil. Singkatnya, tanpa konsensus teoretis yang memadai, kuantifikasi rentan menghasilkan data yang tampak presisi tetapi sesungguhnya berbicara tentang konsep yang berbeda-beda.

Validitas pengukuran spiritual juga terhambat oleh kontaminasi sosial-desirabilitas. Responden sering memberi jawaban yang mencerminkan norma yang diharapkan oleh komunitas ketimbang pengalaman batin nyata. Dalam survei religiusitas misalnya, respon frekuensi ibadah bisa dipengaruhi oleh tekanan sosial sehingga angka tidak selalu paralel dengan kedalaman religiusitas. Peneliti mesti waspada bahwa skor tinggi belum tentu berarti kualitas spiritual yang tinggi, bisa jadi hanya citra sosial yang dipertahankan. Dimensi temporal pengalaman spiritual juga sulit ditangkap kuantitatif. Banyak pengalaman religius bersifat momenial, non-linear, dan kadang muncul setelah peristiwa tertentu. Survei cross-sectional yang mengambil snapshot pada satu waktu gagal merekam dinamika longitudinal perubahan spiritual misalnya transformasi niat atau bertumbuhnya taqwa yang penting untuk memahami efek jangka panjang praktik keagamaan.

Berikutnya, terdapat tantangan kultur-linguistik ketika menerjemahkan kategori normatif menjadi item kuantitatif. Konsep seperti barakah, ihsan, atau niyyah sarat makna historis dan teologis yang sulit dinetralisasi menjadi satu atau dua pertanyaan. Upaya menerjemahkan makna tersebut ke bahasa survei berisiko menghilangkan nuansa. Hasilnya, instrumen menjadi lebih kompatibel dengan logika psikometrik modern daripada logika keagamaan yang menjadi sumber makna itu sendiri. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa padanan linguistik yang tepat perlu dikembangkan bersama pemangku konteks lokal.

Ketergantungan pada angka-angka agregat menyamarkan pluralitas pengalaman. Statistik sebaran rata-rata atau proporsi tidak memberi ruang untuk narasi individual yang menunjukkan mengapa dua orang dengan frekuensi ibadah sama bisa memiliki kualitas spiritual berbeda. Penelitian etnografis dan naratif mengilustrasikan bagaimana perbedaan makna di balik praktik yang tampak serupa hanya dapat diakses lewat dialog mendalam, bukan statistik deskriptif. Untuk alasan ini banyak peneliti kontemporer merekomendasikan triangulasi kualitatif untuk memperkaya interpretasi data kuantitatif.

Validitas konstruk, apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang diklaim sering dipertanyakan dalam skala spiritual yang dikembangkan cepat tanpa landasan teoretis yang kuat. Sejumlah kajian review menemukan puluhan skala dengan overlap konsep yang minim dan bukti validitas yang terbatas. Tanpa prosedur validasi multikultural dan analisis faktor yang ketat, skor konstruk spiritual rentan menyesatkan praktik kebijakan atau intervensi berbasis bukti semu. Terdapat juga problem operasionalisasi nilai-nilai normatif seperti keadilan, amanah, atau masalah ke dalam indikator kuantitatif. Bagaimana menimbang antar-dimensi? Apakah keadilan diukur lewat persepsi distributif (pembagian materi) atau prosedural (proses membuat keputusan)? Pilihan operasionalisasi akan mengarahkan hasil dan rekomendasi kebijakan. Penelitian yang mengembangkan indikator maqāṣid, misalnya, menunjukkan bahwa translasi nilai ke metrik memerlukan banyak iterasi dan konsolidasi ahli agar indikator valid dan bermakna.

Kuantifikasi spiritual tanpa praktik reflektif juga mengabaikan dimensi niat, aspek sentral dalam tradisi Islam yang merupakan fenomena internal dan sering tidak terungkap lewat cara standar pengukuran perilaku. Walaupun peneliti mencoba memasukkan item tentang motivasi, self-report tetap rentan bias dan tidak dapat memverifikasi kedalaman niat. Di sinilah peran metodologi kualitatif untuk mengeksplorasi narasi niat dan konteks pembentukannya. Di ruang praktik kebijakan dan evaluasi organisasi, penggunaan metrik kuantitatif yang tidak peka nilai dapat menghasilkan intervensi yang simplistik. Contohnya, mengukur keberhasilan dakwah hanya dari jumlah peserta atau frekuensi kegiatan mengabaikan kualitas perubahan hati atau keterlanjutan perilaku moral.

Selain itu, ada masalah etika penelitian yang muncul ketika peneliti memakai instrumen kuantitatif untuk menilai aspek batin. Menanyakan langsung soal pengalaman spiritual mendalam dapat memicu ketidaknyamanan, disonansi identitas, atau bahkan manipulasi jawaban. Penelitian etis di lapangan menekankan pentingnya protokol sensitif budaya, informed consent yang jelas, dan metode alternatif (narasi tertulis, diary spiritual) yang memberi ruang aman bagi responden. Hal ini menunjukkan bahwa kuantifikasi saja tidak mencukupi tanpa perhatian etis dan metodologis.

Kapabilitas teknis juga memunculkan batasan, banyak skala spiritual belum diuji bagi kegunaan lintas-bahasa dan pengukuran invariance apakah struktur faktor sama antar-kelompok budaya. Tanpa uji invariance, perbandingan antar-komunitas bisa menyesatkan. Perbedaan skor mungkin mencerminkan perbedaan cara responden memahami pertanyaan, bukan perbedaan tingkat spiritualitas. Selain aspek metodologis teknis, terdapat kritik konseptual yaitu kuantifikasi cenderung memfasilitasi reduksi epistemik, di mana fenomena bermakna dipaksa masuk ke kategori yang mudah diolah secara statistik. Hal ini relevan ketika ilmu sosial Islam ingin mempertahankan dimensi teleologisnya, tujuan ilahiyah tidak dapat disimplifikasi tanpa konsekuensi pada kualitas interpretasi.

Respons akademik terhadap keterbatasan ini kerap berupa strategi mixed-methods. Kuantifikasi dipakai untuk menggambarkan pola luas, sedangkan kualitatif dipakai untuk menggali makna di balik pola tersebut. Studi-studi empiris di bidang spiritualitas dan kesehatan mental menunjukkan bahwa pendekatan sekuensial (survey lalu wawancara mendalam) memperkaya interpretasi dan meningkatkan validitas temuan namun strategi ini memerlukan sumber daya dan waktu lebih besar. Perlu dicatat pula bahwa beberapa fenomena spiritual dapat diukur secara indikatif jika indikatornya dirancang bersama komunitas dan dilandaskan

pada teks serta praktik lokal. Misalnya indikator kesejahteraan berbasis maqāsid yang menggabungkan dimensi material dan spiritual. Namun proses co-design indikator ini memakan proses panjang: konsultasi ulama, pakar metodologi, dan komunitas untuk menjaga kesahihan nilai dan kegunaan empirisnya. Oleh karenanya, kuantifikasi yang bermakna adalah hasil proses kolaboratif, bukan imposisi instrumen eksternal.

Tantangan lain adalah pengukuran fenomena transformatif, misalnya pengalaman taubat atau perubahan moral yang seringkali tidak berlangsung secara linier dan mungkin memiliki aspek yang tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata. Karena itu, metodolog kualitatif memegang peranan penting untuk menangkap proses naratif perubahan, sedangkan kuantifikasi dapat membantu melacak prevalensi atau korelasi faktor pendukung, bukan menjadi alat tunggal untuk menilai kedalaman transformasi. Indikator kuantitatif perlu diperkaya dengan kriteria kualitas komunikasi, perubahan sikap, dan implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari, yang memerlukan observasi lapangan dan dokumentasi naratif. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif harus menggabungkan metrik kuantitatif dan metode kualitatif yang sensitif konteks.

Krisis Representasi Makna: Tantangan atas Tradisi Hermeneutik Islam

Krisis representasi makna bermula ketika teks-teks agama khususnya al-Qur'an dan hadis diperlakukan sebagai benda yang memiliki satu makna tunggal yang dapat dipindai dan ditransfer langsung ke konteks kontemporer tanpa proses interpretatif yang intens. Tradisi tafsir klasik memang memiliki prinsip-prinsip tekstual dan sanad, tetapi modernitas hermeneutik menonjolkan aspek dinamika pembacaan makna bukan semata sifat teks, melainkan hasil dialektika antara teks, konteks sosial-historis, dan pembaca. Ketika aktor-aktor sosial baru, media digital, akademisi baru, dan aktor politik ikut memproduksi tafsir, representasi makna menjadi terfragmentasi dan berpotensi dipolitisasi.

Salah satu sumber krisis ialah ketegangan antara otoritas tradisional (ulama, kitab klasik) dan ilmu penafsiran modern yang bersandar pada hermeneutika filosofis. Hermeneutika modern menekankan peran horizon pembaca dan konteks historis. Hal ini sering dipandang oleh sebagian tradisionalis sebagai relativisasi teks yang mengancam finalitas wahyu. Ketegangan ini tidak sekadar akademis, ia menyentuh otoritas legitimasi dalam masyarakat Muslim, sehingga setiap upaya reinterpretasi terkadang menghadapi resistensi keras yang memicu polarisasi.

Di era informasi, krisis makna diperparah oleh dispersi interpretasi di ruang publik. Tafsir-teks yang tadinya beredar lewat buku dan majelis kini tersebar kilat lewat media sosial, video pendek, dan platform otomatisasi teks. Proses representasi makna yang dulu relatif terfilter kini rentan distorsi oleh ringkasan, take-away, atau meme dapat menggantikan pembacaan kontekstual yang panjang. Fenomena ini menyebabkan makna agama mudah disederhanakan sekaligus diperalat untuk tujuan non-keilmuan. Krisis itu juga bersifat epistemik, tradisi hermeneutik Islam di satu sisi memberi instrumen kaya untuk membaca teks, tetapi di sisi lain ada gap antara kompetensi klasik dengan kebutuhan modern. Ketika penafsir tidak menguasai alat modern, dan sebaliknya akademisi modern tidak menguasai disiplin klasik, representasi makna kerap kehilangan integrasi antara otoritas ilmiah Islam dan metodologi kontemporer.

Perdebatan tentang tahrif dan relativisme kerap muncul ketika hermeneutik diaplikasikan pada isu-isu sensitif. Kelompok yang berpegang pada tafsir tekstual tradisional

melihat hermeneutik sebagai pintu masuk menuju tahrif (perubahan makna) dan pelemahan otoritas wahyu. Di ranah akademik, tuduhan ini memicu gatekeeping epistemik yang membatasi eksperimen interpretatif padahal tanpa pembaruan tafsir, teks-teks suci bisa jadi kurang responsif terhadap persoalan kontemporer. Selain itu, praktik hermeneutik modern yang dipengaruhi teori Barat memunculkan perdebatan dekolonial. Pemikir-pemikir seperti Abu Zayd dan Arkoun mencoba memadukan pendekatan linguistik dan sejarah dengan sensitivitas Islam, namun reaksi lokal sering keras sehingga menimbulkan dilema, adopsi teori bermanfaat secara metodologis, tetapi menimbulkan kecurigaan ideologis.

Di ranah akademik muncul masalah metodologis bagaimana menjamin representasi makna yang setia pada sumber sekaligus relevan. Beberapa peneliti mendorong pendekatan interdisipliner, gabungan kajian teks klasik, linguistik modern, kajian sejarah, dan teori sosial. Model-model seperti itu bertujuan menghasilkan representasi makna yang bertanggung jawab tetapi menuntut kapasitas intelektual tinggi yang tidak dimiliki semua institusi pendidikan Islam. Teknologi juga meningkatkan kompleksitas, algoritma rekomendasi mendorong interpretasi yang sensasional agar mendapatkan engagement, bukan kedalaman. Ketika representasi makna dioptimalkan untuk metrik platform, tafsir yang sederhana, provokatif, atau instrumental lebih sering direproduksi. Akibatnya, makna agama yang berlapis cenderung termobilisir menjadi konten mudah-konsumsi yang melemahkan kualitas interpretasi publik.

Politik juga memainkan peran besar, negara-negara atau kelompok politik terkadang mempromosikan tafsir tertentu untuk tujuan legitimasi atau stabilitas. Representasi makna menjadi instrumen legitimasi politik yang dapat mengubah bagaimana ajaran agama dipraktekkan di ruang publik. Dampaknya, ruang interpretasi menjadi tertutup bagi suara oposisi atau pengembangan hermeneutik yang kritis. Pendidikan agama formal turut menentukan kualitas representasi makna. Kurikulum yang menekankan hafalan teks tanpa keterampilan tafsir kritis cenderung memproduksi representasi makna yang literal dan konservatif. sebaliknya kurikulum yang melek hermeneutik dapat menghasilkan pembaca tekun yang memahami lapisan makna dan konteks.

Representasi makna Islam sering dibentuk oleh warisan orientalis dan pendekatan ilmu sosial Barat yang mengobjektifikasi teks. Dekolonisasi hermeneutik mengusulkan pembacaan yang memulihkan sumber-sumber Islam sendiri (linguistik Arab klasik, tradisi tafsir lokal) sambil membuka dialog kritis dengan teori Barat, tujuannya adalah representasi makna yang otonom namun dialogis. Dalam praktik tafsir kontemporer, beberapa sarjana sukses mengembangkan metodologi hybrid, memakai analisis historis-linguistik untuk menempatkan teks dalam konteksnya sambil menggunakan teori etika maqasid untuk mengarahkan aplikasinya hari ini. Pendekatan ini membantu menghasilkan representasi makna yang tidak hanya deskriptif tetapi juga normatif dan aplikatif. Model hybrid semacam ini makin banyak dijadikan contoh di studi-studi kasus.

Reduksi Realitas Sosial menjadi Mekanika Sebab-Akibat

Salah satu ciri utama pendekatan positivistik adalah kecenderungan menjelmakan realitas sosial menjadi rangkaian hubungan sebab-akibat linier ($A \rightarrow B \rightarrow C$). Dalam praktiknya hal ini mempermudah perancangan eksperimen, model regresi, dan rekomendasi kebijakan karena menuntaskan masalah “apa yang menyebabkan apa?”. Namun problemnya, kehidupan sosial bukan mesin sederhana. Tindakan manusia dimotivasi oleh nilai, makna, struktur institusi, dan konteks historis yang berlapis sehingga mengabaikan kompleksitas ini

berisiko menghasilkan penjelasan terpotong dan kebijakan yang tidak efektif. Fenomena sosial sering bersifat non-linier, berulang, dan memiliki multiple causation.

Pengurangan dunia sosial menjadi mekanika sebab-akibat juga berkaitan dengan asumsi stabilitas hubungan kausal. Banyak model kuantitatif mengasumsikan kestasioneran atau hubungan yang konstan antar-variabel, padahal di dunia nyata hubungan ini sering berubah mengikuti konteks waktu, tempat, atau intervensi baru. Literatur tentang teori kompleksitas menyarankan perhatian pada dinamika temporal. Misalnya bagaimana umpan balik (feedback loops) membuat efek suatu intervensi berfluktuasi atau bahkan berbalik arah dalam jangka menengah.

Keterbatasan penjelasan kausal linier menjadi nyata dalam penelitian lintas-bidang. Studi tentang penyebab perilaku kolektif misalnya, menunjukkan bahwa berbagai jalur kondisi (equifinality) dapat membawa ke hasil yang sama. Artinya tidak ada satu penyebab tunggal yang dapat dijadikan dasar kebijakan tunggal. Pendekatan konfiguratif seperti QCA (Qualitative Comparative Analysis) dan fsQCA dikembangkan untuk menangkap pola multikausal dan kombinatorial ini sehingga penelitian tidak memaksakan logika satu-penyebab.

Dari sisi metode statistik, muncul pula bukti bahwa kausalitas dapat bersifat non-linier dan asimetris; hubungan $A \rightarrow B$ tidak otomatis berarti $B \rightarrow A$ berlaku serupa. Oleh karena itu, teknik baru dikembangkan untuk mendeteksi pola hubungan non-linier dan interaksi yang kompleks di data sosial, menantang dominasi model linier klasik. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pemikiran kausal perlu diperluas untuk menangani dinamika dunia sosial.

Kritik filosofis terhadap reduksi kausal juga muncul dari aliran realisme kritis yang menggarisbawahi bahwa hubungan sebab-akibat yang nampak di permukaan sering merupakan manifestasi dari struktur dan mekanisme yang lebih dalam. Realisme kritis mendorong peneliti untuk mencari mekanisme yang menjelaskan 'bagaimana' sesuatu bisa terjadi dalam kondisi tertentu, bukan sekadar mencatat korelasi. Pendekatan ini relevan untuk ilmu sosial Islam yang berupaya menjelaskan fenomena dengan memperhitungkan struktur normative dan institusional.

Pada level kebijakan, model kausal linier sering memicu intervensi yang tampak logis namun berujung pada efek samping tak terduga karena mengabaikan loop umpan balik dan adaptasi sistem. Di ranah pengukuran psikologis dan sosial, asumsi bahwa konstruk psikologis dapat diperlakukan sebagai variabel terpisah yang saling berpengaruh secara linier telah memperoleh kritik tajam. Kajian-kajian kontemporer menyoroiti bahwa konstruk sering muncul dari jaringan saling terhubung sehingga perubahan pada satu node bisa berdampak melalui jalur tak terduga. Pemahaman ini mendorong peneliti untuk memakai model jaringan dan metode yang mengakui interdependensi.

Implikasi etis dari reduksi kausal sangat penting, kebijakan berbasis penyederhanaan bisa merugikan kelompok rentan karena mengabaikan faktor struktural yang berkontribusi pada ketidaksetaraan. Pendekatan kompleksitas memberi kerangka etis yang lebih berhati-hati karena menuntut kajian dampak sampingan, adaptasi sistem, dan distribusi efek antar-pemangku kepentingan. Oleh karena itu, integrasi perspektif kompleksitas adalah bukan sekadar teknis tetapi juga pilihan etis. Dalam praktik penelitian terapan, beberapa studi menunjukkan bagaimana pengabaian interaksi kompleks menyebabkan policy failure, kebijakan yang tampaknya bukti-berbasis namun tak memberi hasil jangka panjang.

KESIMPULAN

Dilema metodologis dalam ilmu sosial Islam berakar pada ketegangan epistemologis antara paradigma positivisme yang mendominasi ilmu-ilmu sosial modern dan epistemologi Islam yang bertumpu pada tauhid, nilai, dan integrasi makna. Positivisme membangun metodologi berdasarkan objektivitas empiris, reduksionisme, serta pemisahan fakta–nilai, sementara Islam menekankan keterpaduan realitas dan dimensi normatif yang inheren dalam fenomena sosial. Ketegangan ini menimbulkan problem mendasar: metode positivistik tidak mampu sepenuhnya menangkap kompleksitas makna, intensionalitas manusia, serta nilai-nilai syariah yang melekat dalam kehidupan sosial Muslim. Karena itu, dilema metodologis muncul bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai problem filosofis terkait fondasi ilmu.

Kritik epistemologis terhadap dominasi positivisme dalam ilmu sosial Islam menunjukkan bahwa pendekatan positivistik cenderung menghasilkan penyederhanaan realitas, mengabaikan dimensi makna, menghilangkan unsur nilai, dan mengurung penelitian pada hubungan sebab-akibat yang linier. Berbagai sarjana Muslim menilai bahwa positivisme tidak mampu merepresentasikan fenomena keagamaan, etika, spiritualitas, serta struktur normatif dalam masyarakat Islam. Kritik ini juga mencakup keberatan terhadap klaim netralitas ilmu, karena instrumen, bahasa, dan asumsi positivisme membawa nilai sekuler-modern yang tidak selalu kompatibel dengan kerangka maqāsid al-sharī‘ah. Oleh sebab itu, kritik tidak hanya diarahkan pada metode kuantitatif sebagai teknik, melainkan pada paradigma epistemologis yang mendasarinya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, arah pengembangan metodologi ilmu sosial Islam memerlukan pendekatan integratif yang memadukan kekuatan analitis ilmu sosial modern dengan fondasi epistemologi Islam berbasis tauhid. Integrasi ini dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik seperti hermeneutika Qur’ani, maqāsid al-sharī‘ah, paradigma nilai, serta metode kualitatif interpretatif tanpa menolak sepenuhnya instrumen empiris yang telah berkembang dalam penelitian modern. Dengan demikian, ilmu sosial Islam yang ideal bukan meniru positivisme secara mentah, tetapi merekonstruksi metodologi berdasarkan kebutuhan umat, etika Islam, dan struktur makna yang mendasari tindakan sosial. Hasilnya adalah model metodologi yang mampu menangkap realitas empiris sekaligus menjaga dimensi normatif-spiritual yang menjadi inti pandangan hidup Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, M., & others, and. (2022). Islamic Research Methodology In Contemporary Research: Is It Applicable? *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 11(1). <https://doi.org/10.6007/IJARPED/V11-I1/12366>
- Adley, M., & others, and. (2024). Ethical And Practical Considerations For Including Marginalised Groups In Quantitative Survey Research. *International Journal of Social Research Methodology*, 27(5), 559–574. <https://doi.org/10.1080/13645579.2023.2228600>
- Afandi, A. J., & Muhyidin, M. (2025). Revisiting Al-Faruqi’s Islamization Of Knowledge: A Hermeneutic And Decolonial Analysis For Contemporary Epistemic Reform. *International Journal of Religion and Social Community*, 3(2), 1–26. <https://doi.org/10.30762/ijoresco.v3i2.3568>
- Ahsanul Amal, M., & others, and. (2024). The Impact Of Maqashid Syariah On The Human Development Index (HDI): The Case Of Indonesia. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(02), 109–127. <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6127>
- Akbar, I. A. (2024). Multiplying Barakah To Waliullah: The Quranic Manifestation In A Sociological Context Within The Tarekat Community In East Java, Indonesia. *Malaysia Architectural Journal MAJ*, 2024(1), 19–32.
- Auda, J. (2021). Maqasid Methodology For Re-Envisioning Islamic Higher Education. *Journal*

- of *Contemporary Maqasid Studies*, 1(1), 31–58. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.58>
- Bagis, F., & others, and. (2024). Exploring Islamic Spiritual Well-Being: Conceptualization And Validation Of A Measurement Scale. *Islamic Guidance and Counseling Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.25217/0020247473500>
- Barbrook-Johnson, P., & Carrick, J. (2022). Combining Complexity-Framed Research Methods For Social Research. *International Journal of Social Research Methodology*, 25(6), 835–848. <https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1946118>
- Bielska, B., & others, and. (2024). Strengths And Limitations Of An Online Qualitative Survey In Times Of Social Crisis: Example Of The COVID-19 Pandemic. *Qualitative Sociology Review*, 20(4), 78–100. <https://doi.org/10.18778/1733-8077.20.4.04>
- Brandão, T. (2025). Religion And Emotion Regulation: A Systematic Review Of Quantitative Studies. *Journal of Religion and Health*, 64(3), 2083–2100. <https://doi.org/10.1007/s10943-024-02216-z>
- Byrne, D., & Callaghan, G. (2022). *Complexity Theory And The Social Sciences*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003213574>
- Chagas, C., & others, and. (2023). Religious And Secular Spirituality: Methodological Implications Of Definitions For Health Research. *EXPLORE*, 19(1), 6–13. <https://doi.org/10.1016/j.explore.2022.04.004>
- Crabolu, G., Font, X., & Eker, S. (2023). Evaluating Policy Complexity With Causal Loop Diagrams. *Annals of Tourism Research*, 100, 103572. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103572>
- Du, Y., & others, and. (2024). Editorial: QCA Methodology And Causal Complexity Of Management Studies In China. *Chinese Management Studies*, 18(5), 1293–1301. <https://doi.org/10.1108/CMS-10-2024-801>
- Ermawati, E., Baimunah, S., & Nursalim, E. (2025). Methodological Transformation In Islamic Theological Studies: From Classical Traditions To Contemporary Approaches. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 6(1), 61–70. <https://doi.org/10.59525/ijois.v6i1.986>
- Eronen, M. I. (2025). Causal Complexity And Psychological Measurement. *Philosophical Psychology*, 38(5), 2217–2232. <https://doi.org/10.1080/09515089.2023.2300693>
- Hamdallaha, M. A. H., & Sukamto, B. (2025). Analysis Of Maqashid Shariah Implementation In The Financial Performance Of Islamic Rural Banks (BPRS) In Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 5(5), 653–669. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku4421>
- Harari, Y. N. (2017). Reboot For The AI Revolution. *Nature*, 550(7676), 324–327. <https://doi.org/10.1038/550324a>
- Haruna, S. L. (2024). Contemporary Approaches To Qur’anic Hermeneutics. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 8(2), 314–318. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i2.83869>
- Ichwan, M. N., & Salisu, A. (2024). Reevaluating Qur’anic Hermeneutics: A Comparative Analysis Between Classical Tafsir And Modern Hermeneutical Approaches. *KALAM*, 18(2), 107–126. <https://doi.org/10.24042/kalam.v18i2.24213>
- Ismaiza Busti, R., & Saputra, R. (2025). The Axiological Foundations Of Knowledge: A Comparison Of Western And Islamic Perspectives And Their Integration In Supporting The Achievement Of SDGs. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(02), 421–432. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.8528>
- Kepplinger, E. (2025). The Maqāsid As A Means For A Contemporary, Ethically Based Muslim Thought: A Comparison Of The Views Of Ṭāhā ‘Abd Al-Raḥmān And Ṭaha Jābir Al-‘Alwānī. *Religions*, 16(8), 1080. <https://doi.org/10.3390/rel16081080>
- Keskin, Z., & Aste, T. (2020). Information-Theoretic Measures For Nonlinear Causality

- Detection: Application To Social Media Sentiment And Cryptocurrency Prices. *Royal Society Open Science*, 7(9). <https://doi.org/10.1098/rsos.200863>
- Lestari, R., Ludfi, L., & Suhaili, S. (2025). The Crisis Of Knowledge Authority In Quranic Interpretation: Reflections On The Philosophy Of Science On Misinformation In The Era Of Social Media. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 8(1), 107–118. <https://doi.org/10.51192/almubin.v8i1.1694>
- Mostfa, A. (2024). Redefining Qur’ānic Hermeneutics: Muḥammad ‘Ābid Al-Jābrī And Nasr Ḥāmid Abū Zayd’s Humanistic Interpretations. *Religions*, 15(3), 278. <https://doi.org/10.3390/rel15030278>
- MR, M. I. F., & others, and. (2025). Positivism And Ibn Khaldun’s Thought: Bridging Objectivity And Social Dynamics. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 12(1), 26–36. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v12i1.83847>
- Muhibudin, M., Jiwanto, F. I., & Maarif, S. (2025). Preserving The Purity Of Revelation: The Challenge Of Hermeneutics To Qur’anic Da’wah. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 16(2), 347–367. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i2.4834>
- Muhibudin, M., & others, and. (2025). *Model Dakwah Minoritas Berbasis Maqasid Syariah: Membangun Harmoni Dan Keberlanjutan Sosial*. PT. Tren Digital Publishing. <https://www.trendigitalpublishing.com>
- Nazih, A. G., Hidayatullah, H., & Uyuni, B. (2025). Podcasting As A Modern Da’wah Tool For Conveying Sirah Nabawiyah. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 16(2). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i1.4457>
- Quraishi, M., & others, and. (2022). Doing “Judgemental Rationality” In Empirical Research: The Importance Of Depth-Reflexivity When Researching In Prison. *Journal of Critical Realism*, 21(1), 25–45. <https://doi.org/10.1080/14767430.2021.1992735>
- Ridwan, M., & others, and. (2024). Methods Of Applying Hermeneutics In Interpreting The Qur’an And Sharh Hadith. *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, 5(2), 447–455.
- Rogers, M., & others, and. (2024). A Questionnaire-Based Study Of Attitudes To Spirituality In People Using Mental Health Services And Their Perceptions Of The Relevance Of The Concept Of Spiritually Competent Practice. *Journal of Spirituality in Mental Health*, 26(3), 218–233. <https://doi.org/10.1080/19349637.2023.2205036>
- Sholeh, M. M. A., & others, and. (2023). Good Character, Good Deeds And Good Speech For Developing Multicultural Islamic Education: An Islamic Concept. *Multicultural Islamic Education Review*, 1(2), 180–195. <https://doi.org/10.23917/mier.v1i2.3427>
- Soediro, A., & Meutia, I. (2018). Maqasid Syariah As A Performance Framework For Islamic Financial Institutions. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9005>
- Suliswanto, M. S. W., Mahyudi, M., & Barom, M. N. (2025). A Maqasid-Based Welfare Index In Indonesia: An Empirical Investigation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 119–146. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2098>
- Tahir, T., & Abdel Hamid, S. H. (2024). Maqasid Al-Syari’ah Transformation In Law Implementation For Humanity. *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Taqiyuddin, M. (2025). Islamic Communication: A Critical Realist Perspective. *JOCRIFE: Journal of Critical Realism in Socio-Economics*, 3(3), 254–275. <https://doi.org/10.21111/jocrise.v3i03.84>
- Taufiq, M. S., & Fahrudin, M. (2023). The Hermeneutics Of Islamic Law In Reviewing Changes To The Minimum Age For Marriage. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 1–23. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2764>
- Wani, N. U. I. (2024). Peace And Conflict Resolution In Islam: A Perspective Building.

Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies.
<https://doi.org/10.20885/ijjis.vol6.iss2.art2>

- Yunus Mustofa, M., Djamil, A., & Irsyad, M. F. (2023). A Critical Analysis Of Auguste Comte's Positivism For Islamic Digital Research. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12.i1.681>
- Yus, S., Walidin, W., & Sain, Z. H. (2024). Positivism And Postpositivism: A Paradigmatic Analysis Of Science And Islamic Education In Indonesia. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 23(2), 162. <https://doi.org/10.29300/attalim.v23i2.6364>
- Zimba, O., & Gasparyan, A. Y. (2023). Designing, Conducting, And Reporting Survey Studies: A Primer For Researchers. *Journal of Korean Medical Science*, 38(48). <https://doi.org/10.3346/jkms.2023.38.e403>